BAB III

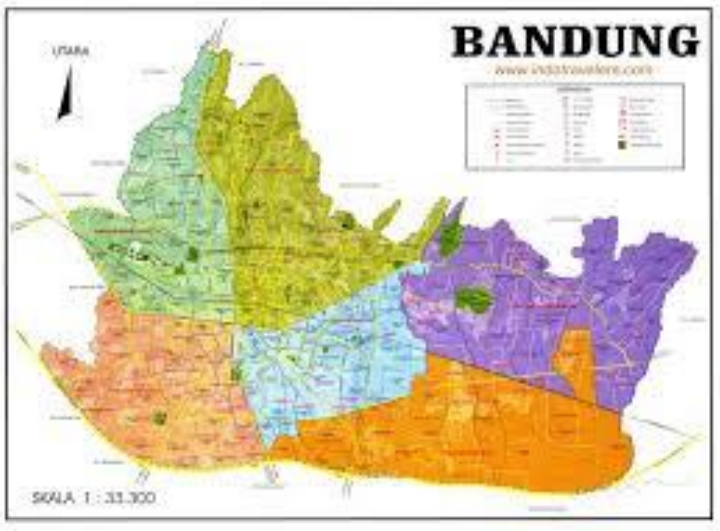
OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Kota Bandung

Kota Bandung adalah ibu kota provinsi Jawa Barat. Pada zaman dulu dikenal sebagai *Parijs van Java* (bahasa Belanda) atau "Paris dari Jawa". Karena terletak di dataran tinggi, Bandung dikenal sebagai tempat yang berhawa sejuk. Hal ini menjadikan Bandung sebagai salah satu kota tujuan wisata. Berikut adalaha peta Kota Bandung :

Gambar. 3.1
Peta Kota Bandung



Sumber : (*indotravelers.com)*

Selain itu keberadaan perguruan tinggi negeri dan banyak perguruan tinggi swasta di Bandung membuat kota ini dikenal sebagai salah satu kota pelajar di Indonesia.

Kondisi Kota Bandung saat ini telah mengalami banyak perubahan positif. Namun disamping kemajuan yang dialami oleh Kota Bandung, sangat disayangkan masih ada sebagian pihak yang merasa belum dapat menikmati pembangunan secara menyeluruh. Salah satunya para penyandang dabilitas Kota Bandung yang berjumlah kurang lebih 10.000 orang.

Para penyandang disabilitas tersebut belum bisa mandiri sepenuhnya. Salah satunya mereka belum bisa mandiri karena tidak tersedianya fasilitas khusus yang menunjang aktifitas/kegiatan sehari - hari seperti : trotoar, halte, jembatan penyebrangan, sarana transportasi, tempat antri khusus, dll, belum tersedia.

3.1.2 Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang dimaksud penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik, dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental. Dalam undang-undang tersebut juga telah mengatur adanya kuota 1 (satu) persen bagi penyandang cacat dalam ketenagakerjaan, artinya ada kewajiban bagi perusahaan

untuk mempekerjakan 1 orang penyandang cacat untuk setiap 100 orang pegawai. jumlah penyandang cacat di Kota Bandung hingga kini mencapai 10.200 orang.

Klasifikasi Penyandang Disabilitas :

Menurut UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, berbagai faktor penyebab serta permasalahan kecacatan, maka jenis-jenis kecacatan dapat di kelompokkan sebagai berikut :

1. **Penyandang Cacat Fisik**

   a. Tuna Netra, berarti kurang penglihatan. Keluar biasaan ini menuntut adanya pelayanan khusus sehingga potensi yang dimiliki oleh para tuna netra dapat berkembang secara optimal.

Gambar 3.2
Penyandang Tuna Netra



Sumber *: (sosbud.compasiana.com)*

b. Tuna Rungu/ Wicara

Tuna Rungu, ialah individu yang mengalami kerusakan alat atau organ pendengaran yang menyebabkan kehilangan kemampuan menerima atau menangkap bunyi serta suara. sedangkan Tuna Wicara, ialah individu yang mengalami kerusakan atau kehilangan kemampuan berbahasa, mengucapkan kata-kata, ketepatan dan kecepatan berbicara, serta produksi suara.

Gambar 3.3
Penyandang Tunarungu



Sumber : (*sosbud.compasiana.com*)

c. Tuna Daksa

Secara harfiah berarti cacat fisik. Kelompok tuna daksa antara lain adalah individu yang menderita penyakit epilepsy (ayan), kelainan tulang belakang, gangguan pada tulang dan otot,serta yang mengalami amputasi.

Gambar 3.4
Penyandang Tuna Daksa



Sumber : (*jabarprov.go.id*)

3.1.3 Persatuan Penyandang Cacat Indonesi (PPCI)

3.1.3.1 Sejarah Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI)

Persatuan Penyandang Cacat Indonesia" atau disingkat PPCI dibentuk pada tanggal 11 Maret 1987, berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. PPCI bersifat non partisan dan terbuka bagi seluruh Organisasi Sosial Penyandang Cacat, Organisasi Sosial Kecacatan dan Organisasi Kemasyarakatan Penyandang Cacat Tingkat Nasional. PPCI adalah Payung bagi Organisasi Sosial Penyandang Cacat, Organisasi Sosial Kecacatan dan Organisasi Kemasyarakatan Penyandang Cacat sesuai dengan tingkat kedudukannya berfungsi sebagai wadah perjuangan, koordinasi, Konsultasi, advokasi dan sosialisasi bidang kecacatan ditingkat nasional dan internasional.

Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) merupakan organisasi payung dan beranggotakan beragam organisasi sosial kecacatan di Indonesia yang didirikan tahun 1987. Visi lembaga ini adalah mewujudkan partisipasi penuh dan persamaan kesempatan penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan. PPCI berfungsi sebagai lembaga koordinasi i bagi anggota-anggotanya, sedangkan bagi pemerintah PPCI merupakan mitra dalam penyusunan berbagai kebijakan dan program berkaitan penyandang disabilitas. PPCI memiliki jaringan kerja hampir diseluruh provinsi di Indonesia.

3.1.3.2 Visi Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI)

Visi PPCI adalah terwujudnya partisipasi penuh dan kesamaan kesempatan Penyandang Cacat dalam segala aspek Kehidupan dan Penghidupan. Misi PPCI adalah :

1) Melakukan koordinasi dan konsultasi tentang semua hal yang berkaitan dengan kecacatan.

2) Melakukan advokasi terhadap perjuangan hak dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Cacat.

3) Menyeimbangkan kewajiban dan hak Penyandang Cacat sebagai warga negara Indonesia.

4) Mengupayakan keterpaduan langkah, potensi Penyandang Cacat dalam rangka peningkatan kualitas, efektifitas, efesiensi dan relevansi atas kemitraan yang saling menguntungkan dan bermartabat.

5) Memberdayakan Penyandang Cacat agar turut berperan serta sebagai pelaku pembangunan yang mandiri, produktif dan berintegrasi.

6) Melakukan kampanye kepedulian dan kesadaran publik sebagai media sosialisasi dan informasi tentang Penyandang Cacat kepada masyarakat.

PPCI bertujuan memperjuangkan pemenuhan hak-hak Penyandang Cacat agar memperoleh kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan serta dapat berpartisipasi penuh dalam pembengunan nasional.

3.1.3.2 Susunan Pengurus Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) Kota Bandung Periode 2009 – 2014

Pelindung	: Walikota Bandung
	Ketua DPRD Kota Bandung
Pembina	: Ketua PPCI Pengda Jabar
	RBM Kota Bandung
Penasehat	: Aef Wahyudin
	Asep Solihin, St
	Adik Fachroji
	Sujana, S.Pd
Ketua	: Djumono Ws
Wakil Ketua I	: Johanes Suhendra
Sekretaris	: Ricky Hermansyah
Bendahara	: Suhendar, Sh
Bidang – Bidang :	
1. Sekretariatan	: Billi Briliant
	Ika Damayanti
	Popi
2. Organisasi&Advokasi	: Edi Ali, S.Pd
3. Kesejahteraan &Pemberdayaan	: Cepi Gunawan
	Dede Afandi S.Pd
	Ani Suryani, S.Pd
4. Pemuda & Olahraga	: Yadi
	Tukiyo, S.Pd
	Wahyu Fitriyanto

5. Rohani,Seni&Budaya	: Hendra Kusuma
	Taupik Hidayat
6. Perempuan & Anak	: Linda Indriyani Rompas
	Yeni
7. Humas	: Juju Kusnadi
	Irfan
	Jaya Pramana

3.1.4 Partai Politik Peserta Pilgub Jawa Barat Tahun 2013

Partai politik sebagai wadah bagi masyarakat dalam menampung aspirasi. Keberadaan partai politik di Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat mempunyai peranan penting dalam perkembangan partai politik. Berikut ini nama partai politik yang tergabung dalam koalisi pilgub jabar 2013 yaitu :

1: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

2: Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

3: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

4: Partai Golongan Karya (Partai Golkar)

5: Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)

6: Partai Demokrat

7: Partai Amanat Nasional (PAN)

8: Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

9: Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura)

3.1.4.2 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

VISI & MISI :

(a) Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangakn dalam Pembukaan Undang- undang Dasar 1945

(b) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual

(c) Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah

3.1.4.3 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

1. Visi Umum:

   "Sebagai Partai Da'wah Penegak Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Bingkai Persatuan Ummat Dan Bangsa."

2. Visi Khusus:

   Partai Berpengaruh Baik Secara Kekuatan Politik, Partisipasi, Maupun Opini Dalam Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Madani.

3. Misi

   a. Menyebarluaskan Da'wah Islam Dan Mencetak Kader-Kadernya Sebagai Anashir Taghyir.
   b. Mengembangkan Institusi-Institusi Kemasyarakatan Yang Islami Di Berbagai Bidang Sebagai Markaz Taghyir Dan Pusat Solusi.

c. Membangun Opini Umum Yang Islami Dan Iklim Yang Mendukung Bagi Penerapan Ajaran Islam Yang Solutif Dan Membawa Rahmat.
d. Membangun Kesadaran Politik Masyarakat, Melakukan Pembelaan, Pelayanan Dan Pemberdayaan Hak-Hak Kewarganegaraannya.
e. Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Terhadap Kekuasaan Secara Konsisten Dan Kontinyu Dalam Bingkai Hukum Dan Etika Islam.
f. Secara Aktif Melakukan Komunikasi, Silaturahim, Kerjasama Dan Ishlah Dengan Berbagai Unsur Atau Kalangan Umat Islam Untuk Terwujudnya Ukhuwah Islamiyah Dan Wihdatul-Ummah, Dan Dengan Berbagai Komponen Bangsa Lainnya Untuk Memperkokoh Kebersamaan Dalam Merealisir Agenda Reformasi.
g. Ikut Memberikan Kontribusi Positif Dalam Menegakkan Keadilan Dan Menolak Kedhaliman Khususnya Terhadap Negeri-Negeri Muslim Yang Tertindas.

3.1.4.4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Visi & Misi

Pertama, mewujudkan amanat penderitaaan rakyat sebagaimana termaktub dalam cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Kedua, menjaga dan melaksanakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar dan arah berbangsa dan bernegara; sebagai sumber inspirasi dan harapan bagi rakyat; sebagai norma pengatur tingkah laku kebijakan, kelembagaan dan anggota partai; dan sebagai cermin dari keseluruhan jati diri partai.

Ketiga, mengantarkan Indonesia untuk berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai syarat-syarat minimum bagi perwujudan cita-cita bersama.

3.1.4.5 Partai Golongan Karya (Partai Golkar)

1. VISI PERJUANGAN

Sejalan dengan cita-cita para bapak pendiri negara (the founding fathers) kita bahwa tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ikut menciptakan perdamaian dunia, maka Partai GOLKAR sebagai pengemban cita-cita Proklamasi menegaskan visi perjuangannya untuk menyertai perjalanan bangsa mencapai cita-citanya.

Partai GOLKAR berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berahlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan, serta disiplin yang tinggi.

Dengan visi ini maka Partai GOLKAR hendak mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan. Reformasi pada sejatinya adalah upaya untuk menata kembali sistim kenegaraan kita disemua bidang agar kita dapat bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka dan demokratis. Bagi Partai GOLKAR upaya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang bertumpu pada kedaulatan rakyat adalah cita-cita sejak kelahirannya.

2. MISI

Dalam rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut Partai GOLKAR dengan ini menegaskan misi perjuangannya, yakni: menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan idiologi bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia.

Dalam rangka membawa misi mulia tersebut Partai GOLKAR melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah partai politik modern, yaitu:

Pertama,

Mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik.

Kedua,

Melakukan rekruitmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (merit system) untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Ketiga, Meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi dan kritik dari masyarakat.

3.1.4.6 Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)

Visi Partai Gerindra

Visi Partai Gerindra dalam Berbangsa dan Bernegara

Visi Partai Gerindra adalah menjadi Partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi Partai Gerindra, Partai Gerindra memiliki 5 (lima) misi, yaitu :

1. Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

2. Mendorong pembangunan nasional yang menitik beratkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan mengurangi ketergantungan kepada pihak asing;
3. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat;
4. Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan praduga tak bersalah dan persamaan hak di depan hukum;
5. Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusi melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden untuk menciptakan lapisan Kepemimpinan nasional yang kuat.

3.1.4.7 Partai Demokrat

1. Visi Partai

Partai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

2. Misi Partai

a. Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraaan.

. b. Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut Kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.

c. Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban Warganegara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lebaga perwakilan dan permusyawaratan.

3.1.4.8 Partai Amanat Nasional (PAN)

1. Visi :

   Terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, serta diridhoi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

2. Misi

   1) Mewujudkan kader yang berkualitas dan militan.
   2) Mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat dan membela rakyat.
   3) Mewujudkan PAN sebagai partai yang modern berdasarkan sistem dan manajemen yang unggul serta budaya bangsa yang luhur.
   4) Mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju, mandiri dan bermartabat.

5) mewujudkan tata pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

6) Mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, bermartabat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dihormati dalam pergaulan internasional.

3.1.4.9 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Berdasarkan sejarah perjuangan dan jati diri di atas, maka visi PPP adalah "Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman".

3.1.4.10 Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura)

Visi Partai HANURA

1. Kemandirian Bangsa

   Bangsa Indonesia saat ini terasa tidak mandiri lagi. Banyak tekanan dan intervensi asing yang sudah merajalela merugikan kehidupan seluruh

bangsa. Kita harus rebut kembali, bangun kembali kemandirian kita dalam penyelenggaraan negara.

2. Kesejahteraan Rakyat

   Sebuah kata yang sudah sangat sering diucapkan tetapi sangat sulit diwujudkan. Semua kader Partai HANURA yang juga calon pemimpin bangsa, di benaknya harus selalu tertanam kalimat 'kesejahteraan rakyat Indonesia', sekaligus mampu berusaha menghadirkannya.

Misi Partai HANURA

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan, akuntabel, dengan senantiasa berdasar pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas, dan berkemampuan, yang dalam menjalankan tugas selalu mengedepankan hati nurani.
3. Menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang berkeadilan secara konsisten, sehingga dapat menghadirkan kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Membangun sumber daya manusia yang sehat dan terdidik yang didasari akhlak dan moral yang baik serta memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan dan pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa.

5. Membangun ekonomi nasional yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.
6. Memberantas korupsi secara total dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan bermartabat.
7. Mengembangkan Otonomi Daerah untuk lebih memacu pembangunan di seluruh tanah air dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.1.3 Pemiliahan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat Tahun 2013

3.1.3.1 Proses Pemberian Suara pada Pemiliahan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat Tahun 2013

proses pemberian suara pada pilgub Jabar tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Pemilih Menerima Surat Suara

   a). Anggota KPPS ke 3 memberikan surat suara kepada Ketua KPPS.

   b). Ketua KPPS membubuhkan tanda tangannya dibagian yang disediakan dalam surat suara, dan memberikannya kepada pemilih.

   Jika ternyata surat suara rusak (berlubang, robek, ada tulisan/coretan cetakan kurang sempurna), atau pemilih melakukan kesalahan dalam mencoblos, maka pemilih mengembalikan surat suara kepada Ketua KPPS untuk menerima surat suara baru. Dan penggantian hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Kemudian Ketua KPPS menulis kata “Rusak” pada surat suara tersebut dan dimasukkan dalam sampul khusus.

2. Pemilih Mencoblos Surat Suara Di Dalam Bilik Suara

    1. pemilih memasuki bilik suara yang sudah kosong.
    2. Membantu pemilih penyandang cacat atau tunanetra bila diminta oleh pemilih dengan ketentuan:
        a. Dibantu oleh anggota KPPS ke 6.
        b. Pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS ke 5 dan ke 6 membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan pemilih sendiri.
        c. Pemilih yang tidak mempunyai keduabelah tangan dan pemilih tunanetra, anggota KPPS ke 5 membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS ke 6.
        d. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang memiliki halangan fisik lain dapat meminta bantuan orang lain (selain anggota KPPS ke 5 dan ke 6) dengan ketentuan pencoblosan dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
        e. Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang memiliki halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir.

3. Memasukkan Surat Suara Ke Kotak Suara

a). Pemilih : Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblosnya tidak dapat dilihat.

b). Pemilih menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS bahwa surat suara dalam keadaan terlipat, kemudian surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.

c). Anggota KPPS ke 6 : Wajib senantiasa mengawasi dan memastikan pemilih memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara tanpa menyentuhnya.

4. Mencelupkan Salah Satu Jari Tangan Ke Tinta

pemilih mencelupkan jari dengan tinta khusus dengan cara memberi tanda atau mencelupkan salah satu jari tangan ke botol tinta khusus yang tersedia. Dengan dibantu oleh petugas keamanan, mempersilahkan pemilih meninggalkan lingkungan yang dibatasi di dalam TPS.

3.1.3.2 Kegiatan Penyandang disabilitas dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat Tahun 2013

1. Mengikuti sosialisasi tata cara proses pemberian suara

Sosialisasi tata cara proses pemberian suara dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat tahun 2013 di ikuti dengan baik oleh penyandang disabilitas, seperti dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.5
Kegiatan Sosialisasi Pilgub Jabar 2013



Sumber : (kpu.jabarprov.go.id)

2. Pencoblosan di bilik suara

Tahap pencoblosan surat suara dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat tahun 2013 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.6
Contoh Pencoblosan Pengguna Kursi Roda



Sumber : (kpu.jabarprov.go.id)

3. Tahap memasukan surat suara pada kotak suara

   Pada tahap memasukan surat suara pada kotak suara, penyandang tuna netra dibantu oleh paniti pemungutan suara (PPS), seperti pada gambar berikut:

Gambar 3.7
Contoh Tahap memasukan Surat Suara pada Kotak Suara



Sumber : (kpu.jabarprov.go.id)

4. Tahap mencelupkan salah satu jari pada tinta

   Tahapan terakhir dalam proses pemberian suara pada pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat tahun 2013 yaitu mencelupkan salah satu jari pada tinta, sebagai tanda bahwa pemilih telah memberikan hak suara seperti pada gambar berikut :

Gambar 3.8
Contoh Tahap Mencelupkan Jari Pada Tinta



Sumber : (kpu.jabarprov.go.id)

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang nyata. Metode penelitian deskriptif pertama peneliti merumuskan masalah , selanjutnya mencari informasi mengenai masalah kemudian menggambarkan permasalahan yang terjadi yang kemudian meringkas dan menarik gambaran tentang kondisi dan situasi yang menjadi masalah dalam penelitian ini, yang menggambarkan tentang Pemberdayaan penyandang disabilitas dalam berpartisipasi politik di Kota Bandung.

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan berbagai macam data, untuk memperjelas penelitian, data diperoleh melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi yaitu menulis, melihat langsung ke lapangan dengan pengamatan dan mencatat terhadap gejala-gejala yang diteliti yang berhubungan dengan Pemberdayaan penyandang disabilitas dalam berpartisipasi politik di Kota Bandung.

b. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai atau berbicara secara langsung

dengan nara sumber untuk dijadikan data yang kemudian dianalisa. Wawancara dilakukan dengan penyandang disabilitas dan pengurus partai. Pengumpulan data melalui wawancara sangat diperlukan karena dapat memperoleh data sejelas mungkin.

c. Studi Pustaka

Penggunaan studi pustaka sangat dibutuhkan peneliti untuk menambah wawasan berkenaan dengan teori-teori yang digunakan.Studi pustaka merupakan pengambilan data berupa referensi berdasarkan buku yang berkaitan dengan kinerja dan undang-undang pendidikan.Studi pustaka ini didapat dari buku, artikel dan dokumentasi untuk dikumpulkan sebagai teori yang dijadikan landasan dalam menyusun usulan penelitian.

3.2.2 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *snowball* yakni proses penentuan informan berdasarkan informan atau responden sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai.

Informan juga ditentukan dengan *Purposive.* Teknik penentuan informan yang diambil disesuaikan dengan data yang sesuai dengan maksud dan tujuan dan kebutuhan dalam penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan partisipasi politik

penyandang disabilitas di Kota Bandung. Pengambilan informan penelitian yang berkaitan dengan partisipasi politik penyandang disabilitas yaitu : dari penyandang disabilitas dan pengurus partai politik di Kota Bandung.

Pertimbangan penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan sesuai dengan informan yang bersangkutan dalam partisipasi politik, ada dua teknik penentuan informan, yaitu:

1.Informan Penyandang Disabilitas :

1). Djumono (Informan Kunci) sebagai Ketua Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) Kota Bandung sekaligus sebagai.

2). Riki Hermansyah (Informan Ke-2) sebagai Sekretaris Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) Kota Bandung

3). Rasikin (Informan Ke-3) sebagai penyandang disabilitas kategori tuna netra

4). Rani (Informan Ke-4) sebagai penyandang disabilitas kategori tuna netra

5) Siska (Informan Ke-5) sebagai penyandang disabilitas kategori tuna netra

6). Andre (Informan Ke-6) sebagai penyandang disabilitas kategori tuna daksa

7). Asep Jaenudin (Informan Ke-7) sebagai penyandang disabilitas kategori tuna daksa

8). Rian (Informan Ke-8) sebagai penyandang disabilitas kategori tuna rungu

9). Sutarjo M (Informan Ke-9). sebagai penyandang disabilitas kategori tuna rungu

10). Fahrudin (Informan Ke-10) sebagai penyandang disabilitas kategori tuna rungu.

2. Informan Partai Politik :

1). Riyono sebagai Staf Humas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bertanggung jawab dalam keanggotaan

2). Jajang Miftahudin sebagai Staf Humas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bertanggung jawab dalam keanggotaan

3). Rike sebagai Staf Humas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). yang bertanggung jawab dalam keanggotaan

4). Wawan Zailani sebagai Staf Humas Partai Golkar yang bertanggung jawab dalam keanggotaan

5). Johan, A.Md. sebagai Staf Humas Partai Gerindra yang bertanggung jawab dalam keanggotaan

6). Aminudin Firmansyah sebagai Staf Humas Partai Demokrat yang bertanggung jawab dalam keanggotaan

7). Egi Setiawan sebagai Staf Humas Partai Amanat Nasional (PAN) yang bertanggung jawab dalam keanggotaan

8). Irsandi sebagai Staf Humas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bertanggung jawab dalam keanggotaan

9). M.Fachri sebagai staf Humas Partai Hanura yang bertanggung jawab dalam keanggotaan

3.2.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang peneliti ambil adalah penelitian kualitatif, yang merupakan proses untuk analisis data dalam penelitian ini. Menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan diantaranya :

Pertama, Peneliti mendapatkan data langsung dari objek melalui wawancara tentang partisipasi politik penyandang disabilitas tersebut di Kota Bandung. Dimana data tersebut diambil dengan alat bantu media elektronik dan media *access*. Kemudian membuat transkipnya dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk tulisan dari media *access* tersebut menjadi bentuk data secara *real*. Data yang telah didapat kemudian dibaca berulang-ulang agar peneliti memahami data atau hasil yang telah di dapatkan.

Kedua, peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman dalam melakuakan penelitian. Dengan cara ini, peneliti kemudian kembali membaca transkip wawancara terhadap pengurus partai politik dan penyandang disabilitas Kota Bandung. Kemudian melakukan perangkaian kata-kata untuk di jadikan bahan usulan penelitian, melakukan pemilihan data yang relevan dengan pokok pembicaraan terhadap pengurus partai politik tentang pemberdayaan penyandang disabilitas dalam berparisipasi politik.

Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sebuah kasus yang diteliti. Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan oleh pengurus partai politik dan penyandang disabilitas. Data yang telah dikelompokan tersebut oleh peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan

ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya. Sehingga peneliti dapat menangkap pengalaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada objek.

Ketiga, menguji asumsi atau permasalahan yang terdapat pada pemberdayaan penyandang disabilitas dalam berpartisipasi politik. Selanjutnya setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan dalam bab II, sehingga dapat dicocokan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai.

Keempat, mencari alternatif penjelasan data setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, peneliti masuk ke dalam tahap penjelasan dan berdasarkan kesimpulan yang telah didapat dari kaitanya tersebut, peniliti merasa perlu mencari suatau alternative penjelasan tentang proses pemberdayaan penyandang disabilitas dalam berpartisipasi politik, apa permasalahannya dan bagaimana penyelesaiannya, Sebab dalam penelitian kualitatif memang selalu ada alternative penjelasan yang lain. Dari hasil analisis, ada kemungkinan terdapat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak terfikir sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternative lain melalui referensi atau teori-teori lain. Alternatif ini akan sangat berguna pada bagian pembahasan, kesimpulan dan saran.

Kelima, menulis kembali hasil penelitian penulisan data yang di dapat dari Partai Politik Kota Bandung dan Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI). dalam pemberdayaan penyandang disabilitas, data-data yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu hal yang membantu penulis unntuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini, penulisan yang dipakai yaitu, penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan observasi dengan objek.

Proses dimulai dari data-data yang diperoleh dari partai politik Kota Bandung dan PPCI dibaca berulang kali sehinggga penulis mengerti benar permasalahanya, kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari objek . Selanjutnya dilakukan interpretasi secara keseluruhan, dimana di dalamnya mencangkup keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian.

3.2.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) Kota Bandung yang beralamat di Jl. Pajajaran No.32 Bandung. Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti melakukan penyusunan rancangan judul pada bulan Desember kemudian menyususn usulan penelitian pada bulan Januari hingga Februari. Setelah menyelesaikan usulan penelitian sampai Bab 3, peneliti melakukan seminar usulan penelitian pada bulan Maret. Setelah seminar kemudian peneliti melanjutkan pengumpulan data selama 4 bulan dari Maret hingga Juli. Setelah data lengkap selanjutnya peneliti mengolah data selama 3 bulan yang dilanjutkan dengan pembuatan skripsi. Selanjutnya di uji pada sidang ujian skripsi, untuk jadwal penelitian dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1

Jadwal Penelitian

Waktu / Kegiatan	2012 - 2013							
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
Penyusunan rancangan Judul								
Penyusunan Usulan Penelitian								
Seminar Usulan Penelitian								
Revisi Usulan Penelitian								
Penelitian di Lapangan								
Pengolahan Data								
Sidang Ujian Skripsi								